



ETIKA KOMUNIKASI: TELAAH LITERATUR TENTANG PENGERTIAN, UNSUR, PRINSIP DAN TUJUAN DALAM PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI

Zeira S. Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

zeira3005254013@uinsu.ac.id

Elfi Yanti Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

elfiyantiritonga@uinsu.ac.id

Erwan Effendy

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

erwanefendi@uinsu.ac.id

Received: 30 Juni 2026

Accepted: 31 Juli 2026

Published: 10 Agustus 2026

Abstrak

Transformasi komunikasi digital memperluas akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga meningkatkan risiko disinformasi, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, manipulasi konten, dan rendahnya tanggung jawab dalam berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, unsur, prinsip, dan tujuan etika komunikasi serta menjelaskan relevansinya bagi penguatan literasi digital dan pendidikan masyarakat pada era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan dengan sumber berupa buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta dokumen organisasi internasional yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan sintesis tematik melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, perbandingan, interpretasi, dan perumusan hubungan antarkonsep. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika komunikasi merupakan sistem nilai yang melekat pada komunikator, pesan, media, komunikan, konteks, dampak, dan umpan balik. Prinsip utamanya mencakup kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan akuntabilitas, sedangkan tujuannya meliputi pembangunan kepercayaan, perlindungan kepentingan publik, pembentukan dialog yang sehat, serta pencegahan penyalahgunaan informasi. Dalam pendidikan masyarakat, etika komunikasi menjadi landasan untuk menilai kredibilitas informasi, menghormati hak digital, menggunakan media secara bertanggung jawab, dan menghadapi konten berbasis kecerdasan buatan. Kajian ini menegaskan bahwa etika komunikasi perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan literasi digital untuk membangun ekosistem komunikasi yang kritis, inklusif, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Etika Komunikasi, Literasi Digital, Pendidikan Masyarakat, Komunikasi Digital, Kecerdasan Buatan.



Abstract

The transformation of digital communication has expanded public access to information while increasing the risks of disinformation, hate speech, privacy violations, content manipulation, and irresponsible communication practices. This study analyzes the concepts, elements, principles, and objectives of communication ethics and explains their relevance to strengthening digital literacy and community education in the digital era. A qualitative library research approach was employed using scholarly books, reputable national and international journal articles, and relevant documents issued by international organizations. The materials were analyzed through content analysis and thematic synthesis involving identification, classification, comparison, interpretation, and conceptual integration. The findings show that communication ethics constitutes a value system embedded in communicators, messages, media, audiences, contexts, effects, and feedback. Its principal foundations include honesty, responsibility, fairness, openness, respect for human dignity, and accountability, while its objectives include building trust, protecting the public interest, fostering healthy dialogue, and preventing the misuse of information. In community education, communication ethics provides a foundation for evaluating information credibility, respecting digital rights, using media responsibly, and responding critically to artificial-intelligence-generated content. This review confirms that communication ethics should be integrated into digital literacy education to support the development of a critical, inclusive, and responsible communication environment.

Keywords: Communication Ethics, Digital Literacy, Community Education, Digital Communication, Artificial Intelligence.

PENDAHULUAN

Transformasi komunikasi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus mengubah setiap pengguna menjadi penerima, produsen, dan penyebar pesan. Perubahan ini menghadirkan persoalan krusial berupa disinformasi, ujaran kebencian, perundungan siber, manipulasi konten, pelanggaran privasi, serta penggunaan kecerdasan buatan untuk menghasilkan teks, gambar, audio, dan video yang sulit dibedakan dari materi autentik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak lagi cukup dinilai berdasarkan kecepatan dan jangkauan pesan, tetapi juga berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia (UNESCO, 2021). Secara akademik, fenomena ini penting karena memperluas kajian etika komunikasi dari relasi antarmanusia menuju hubungan antara manusia, platform, algoritma, dan sistem kecerdasan buatan. Secara praktis, lemahnya etika komunikasi dapat menurunkan kepercayaan publik, memperbesar konflik, serta menghambat kemampuan masyarakat dalam menilai informasi. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat membutuhkan landasan etika yang memperkuat literasi digital, verifikasi informasi, perlindungan data pribadi, dan penggunaan media secara bertanggung jawab (Wardle & Hossein, 2017).

Penelitian terdahulu telah merespons persoalan tersebut melalui beberapa jalur kajian. Literatur teori komunikasi membahas etika sebagai dasar pembentukan makna, kredibilitas komunikator, tanggung jawab media, dan kualitas hubungan sosial (McQuail & Deuze, 2026). Kajian komunikasi digital menyoroti perubahan prinsip etis akibat platform,



algoritma, pengumpulan data, serta kecerdasan buatan (UNESCO, 2021). Sementara itu, penelitian literasi media dan literasi media sosial menekankan kemampuan mengakses, mengevaluasi, memproduksi, dan membagikan informasi secara kritis sesuai konteks sosial dan budaya (Manca et al., 2021). Namun, literatur tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Sebagian kajian berfokus pada bidang tertentu, seperti jurnalistik, organisasi, pendidikan, atau media sosial, sehingga konsep etika komunikasi dibahas secara terpisah. Kajian etika teknologi dalam pendidikan juga masih tersebar menurut isu privasi, persetujuan, kepemilikan data, integritas algoritma, tata kelola, dan akuntabilitas tanpa selalu dihubungkan dengan kerangka etika komunikasi yang utuh (Hakimi et al., 2021). Akibatnya, hubungan antara pengertian, unsur, prinsip, tujuan, literasi digital, dan pendidikan masyarakat belum tersintesis secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan merespons kekurangan tersebut melalui telaah literatur integratif yang menyatukan berbagai perspektif ilmu komunikasi, etika digital, literasi media, tata kelola platform, dan pendidikan masyarakat. Secara khusus, penelitian ini membahas empat masalah. Pertama, bagaimana etika komunikasi didefinisikan dalam literatur komunikasi kontemporer dan bagaimana posisinya sebagai sistem nilai dalam proses pembentukan makna. Kedua, bagaimana nilai etis melekat pada unsur komunikator, pesan, media, komunikasi, konteks, dampak, dan umpan balik. Ketiga, prinsip apa saja yang menjadi dasar komunikasi yang bertanggung jawab, terutama kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan akuntabilitas. Keempat, bagaimana tujuan etika komunikasi dapat dihubungkan dengan penguatan literasi digital dan pendidikan masyarakat pada era media sosial dan kecerdasan buatan. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menyintesis buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen organisasi internasional melalui analisis isi dan sintesis tematik. Cara ini diarahkan untuk menghasilkan kerangka konseptual yang tidak hanya menjelaskan etika komunikasi secara normatif, tetapi juga menunjukkan relevansinya bagi pembelajaran, pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat di ruang digital (Snyder, 2019).

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa kualitas literasi digital masyarakat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip etika diintegrasikan ke dalam seluruh unsur komunikasi. Ketika komunikator memiliki integritas, pesan disusun berdasarkan fakta, media digunakan secara transparan, komunikasi melakukan verifikasi, dan umpan balik diberikan secara santun serta argumentatif, masyarakat lebih mampu membangun kepercayaan, melindungi hak digital, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, ketika komunikasi hanya berorientasi pada kecepatan, popularitas, dan keterlibatan pengguna tanpa kejujuran, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap manusia, risiko disinformasi, manipulasi, pelanggaran privasi, diskriminasi, serta konflik



sosial akan meningkat. Dengan demikian, hubungan konseptual yang diajukan adalah bahwa penguatan etika komunikasi mendorong peningkatan literasi digital dan kualitas pendidikan masyarakat, sedangkan lemahnya internalisasi etika memperbesar kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan informasi dan teknologi. Argumen ini tidak ditempatkan sebagai hipotesis statistik karena penelitian menggunakan kajian kepustakaan, tetapi sebagai proposisi analitis yang diperiksa melalui konsistensi temuan antarliteratur. Pendidikan literasi digital karena itu perlu menggabungkan kemampuan teknis, berpikir kritis, kesadaran privasi, tanggung jawab sosial, dan penilaian etis terhadap konten berbasis algoritma maupun kecerdasan buatan (Hakimi et al., 2021).

LANDASAN TEORI

Landasan teori mengenai etika komunikasi di era digital menunjukkan bahwa hubungan antara nilai moral, kualitas pesan, penggunaan media, literasi digital, dan pendidikan masyarakat telah ditanggapi melalui tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian normatif-teoretis memandang etika komunikasi sebagai seperangkat nilai yang mengatur komunikator, pesan, media, komunikan, konteks, efek, dan umpan balik agar komunikasi berlangsung jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati martabat manusia (Wilkins, 1991). Kedua, kajian etika digital menelaah perubahan tanggung jawab akibat platform, algoritma, pemrosesan data, kecerdasan buatan, serta produksi konten sintetis (Floridi, 2023). Ketiga, kajian literasi media dan pendidikan masyarakat berfokus pada kemampuan menilai kredibilitas informasi, mengenali disinformasi, melindungi privasi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab di ruang digital (Broda & Strömbäck, 2024). Peta tersebut memperlihatkan bahwa etika komunikasi telah dibahas luas, tetapi keterhubungan konsep, prinsip, tata kelola teknologi, dan pembelajaran masyarakat masih tersebar dalam tradisi penelitian yang berbeda.

Kecenderungan pertama berorientasi pada landasan normatif dan teoretis etika komunikasi. Fokusnya adalah menjelaskan bagaimana benar-salah, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, keterbukaan, penghormatan, dan kepedulian terhadap dampak pesan menjadi ukuran kualitas komunikasi. Konsep yang digunakan mencakup kredibilitas komunikator, tanggung jawab sosial media, dialog, pembentukan makna, hak penerima pesan, dan relasi etis antara kebebasan berekspresi dengan pencegahan kerugian. Wilkins (1991) menempatkan etika pada pilihan moral dalam komunikasi manusia, sedangkan Littlejohn & Foss (2021) dan Griffin et al (2019) menghubungkannya dengan proses penciptaan makna dan hubungan sosial. McQuail & Deuze (2026) memperluas orientasi tersebut ke komunikasi massa melalui tanggung jawab media terhadap publik. Dalam konteks Indonesia, Batoebara & Lubis (2022) serta Laksana & Nurhaliza (2023) membahas etika komunikasi digital dan kualitas hubungan interpersonal. Kajian dalam pola ini



umumnya menggunakan telaah konseptual, analisis normatif, studi literatur, atau survei persepsi. Kekuatan pendekatan tersebut terletak pada kejelasan prinsip moral, tetapi pembahasannya sering bersifat umum dan belum menjelaskan penerjemahan prinsip ke dalam kompetensi belajar masyarakat ketika menghadapi algoritma, konten sintetis, dan sirkulasi informasi digital.

Kecenderungan kedua berorientasi pada etika teknologi, tata kelola platform, dan kecerdasan buatan. Fokusnya meliputi transparansi algoritma, akuntabilitas penyedia platform, perlindungan data, privasi, bias, manipulasi informasi, serta tanggung jawab manusia dalam produksi dan distribusi konten digital. Floridi (2023) menempatkan martabat manusia, pencegahan kerugian, keadilan, dan tanggung jawab sebagai dasar evaluasi kecerdasan buatan, sedangkan Rousi & Vakkuri (2023) menunjukkan bahwa kemunculan teknologi baru mengubah konteks praktik dan penelitian etika komunikasi. UNESCO (2021) mengembangkan kerangka etika kecerdasan buatan yang berpusat pada hak asasi manusia, sementara pedoman UNESCO (2023) membagi tanggung jawab tata kelola platform kepada negara, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, media, akademisi, dan komunitas teknis. Utari et al (2024) kemudian menempatkan kecerdasan buatan sebagai fenomena yang menantang batas teori komunikasi manusia. Penelitian pada pola ini menggunakan analisis kebijakan, kajian filosofis, studi kasus platform, analisis dokumen, dan sintesis literatur. Kontribusinya adalah memperluas etika dari perilaku individu menuju tanggung jawab sistemik, tetapi orientasi makro tersebut belum selalu diterjemahkan menjadi materi pendidikan masyarakat yang operasional dan kontekstual.

Kecenderungan ketiga berorientasi pada literasi digital, disinformasi, dan pendidikan masyarakat. Fokus penelitian dalam pola ini adalah kemampuan pengguna mengakses, memeriksa, memahami, memproduksi, dan membagikan informasi secara kritis serta bertanggung jawab. Wardle & Hossein (2017) mengembangkan kerangka gangguan informasi untuk membedakan bentuk serta dinamika informasi bermasalah, sedangkan Waisbord (2018) mengkaji tantangan kebenaran, berita palsu, dan kondisi pascakebenaran dalam jurnalisme. Manca et al (2021) menawarkan pendekatan global terhadap literasi media sosial yang menggabungkan kompetensi lintas-platform dengan keterampilan yang spesifik pada setiap platform. Broda & Strömbäck (2024), melalui tinjauan sistematis atas 1.261 artikel, menunjukkan bahwa penelitian misinformasi dan disinformasi berkembang cepat tetapi masih terfragmentasi menurut disiplin, istilah, konteks, dan metode. Hakimi et al (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan jejak digital dalam pendidikan menimbulkan persoalan privasi, persetujuan, kepemilikan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian pada pola ini menggunakan survei, eksperimen literasi, analisis isi, kajian sistematis, dan evaluasi program. Kelemahannya, literasi kerap dipahami sebagai



keterampilan teknis-kognitif, sementara dimensi moral dan relasional komunikasi belum selalu menjadi inti pembelajaran.

Ketiga kecenderungan tersebut belum sepenuhnya memperhatikan etika komunikasi sebagai satu sistem yang menghubungkan nilai moral, unsur komunikasi, struktur teknologi, dan proses pendidikan masyarakat. Kajian normatif menjelaskan prinsip secara kuat, tetapi sering berhenti pada rumusan ideal tanpa menunjukkan bagaimana masyarakat menerapkannya ketika memilih sumber, menilai konten, mengelola data pribadi, atau menanggapi pesan berbasis kecerdasan buatan. Kajian teknologi memperlihatkan tanggung jawab platform dan risiko algoritmik, tetapi cenderung menempatkan warga sebagai pihak yang dilindungi, bukan sebagai komunikator aktif yang juga memproduksi, menafsirkan, dan menyebarkan pesan. Sebaliknya, kajian literasi digital menekankan kemampuan verifikasi dan penggunaan media, tetapi belum selalu mengintegrasikan kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab atas dampak sosial pesan. Fragmentasi serupa tampak dalam naskah awal yang membahas pengertian, unsur, prinsip, dan tujuan secara berurutan, tetapi belum secara eksplisit menyatukannya sebagai kerangka pendidikan masyarakat. Karena itu, kebaruan penelitian terletak pada sintesis yang mempertemukan etika komunikasi, literasi digital, tata kelola teknologi, dan tanggung jawab sosial dalam satu kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk membaca perilaku komunikasi masyarakat pada era digital.

Berdasarkan kekosongan tersebut, penelitian ini merumuskan arah baru dengan menempatkan etika komunikasi sebagai fondasi konseptual bagi literasi digital dan pendidikan masyarakat. Fokusnya bukan hanya mendefinisikan etika atau mendaftar prinsip-prinsip moral, tetapi menjelaskan hubungan antara komunikator yang berintegritas, pesan yang akurat, media yang transparan, komunikan yang kritis, perlindungan konteks dan privasi, pertimbangan dampak, serta umpan balik yang santun dan argumentatif. Melalui penelitian kepustakaan, sumber-sumber teori komunikasi, etika digital, literasi media, tata kelola platform, dan kecerdasan buatan diidentifikasi, dibandingkan, serta disintesis untuk membangun kerangka yang lebih utuh. Orientasi baru ini memandang masyarakat sebagai subjek etis yang sekaligus menerima, menghasilkan, memodifikasi, dan mendistribusikan informasi. Dengan demikian, pendidikan masyarakat perlu menggabungkan kemampuan teknis, penilaian kredibilitas, kesadaran hak digital, pengendalian diri, penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab atas konsekuensi pesan. Kerangka tersebut diharapkan menjelaskan bahwa peningkatan literasi digital tidak cukup dicapai melalui keterampilan menggunakan media, tetapi memerlukan internalisasi prinsip etika pada seluruh tahapan komunikasi, termasuk ketika masyarakat berinteraksi dengan algoritma dan konten berbasis kecerdasan buatan.



METODE PENELITIAN

Unit analisis penelitian ini adalah artefak tekstual berupa gagasan, definisi, argumentasi, prinsip, dan temuan ilmiah yang membahas etika komunikasi di era digital. Fokus analisis tidak diarahkan pada individu, kelompok, organisasi, atau institusi tertentu sebagai subjek lapangan, melainkan pada isi literatur yang menjelaskan hubungan antara nilai moral, unsur komunikasi, literasi digital, pendidikan masyarakat, tata kelola platform, dan kecerdasan buatan. Unit yang ditelaah mencakup pernyataan konseptual mengenai komunikator, pesan, media, komunikan, konteks, dampak, dan umpan balik; prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta akuntabilitas; dan tujuan komunikasi etis dalam membangun kepercayaan serta kepentingan publik. Penetapan fokus pada artefak tekstual memungkinkan penelitian membandingkan persamaan, perbedaan, dan perkembangan pemikiran antarsumber tanpa mengubahnya menjadi penelitian mengenai perilaku pengguna media secara langsung. Dengan demikian, objek material penelitian adalah berbagai dokumen akademik, sedangkan objek formalnya ialah etika komunikasi sebagai landasan penguatan literasi digital dan pendidikan masyarakat dalam menghadapi transformasi komunikasi kontemporer secara sistematis dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan yang berorientasi pada telaah literatur integratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami, membandingkan, dan menyintesis makna serta hubungan antarkonsep, bukan mengukur pengaruh variabel melalui statistik. Penelitian kepustakaan menempatkan karya ilmiah terdahulu sebagai data penelitian yang dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman konseptual baru (Snyder, 2019). Orientasi integratif digunakan karena sumber yang dikaji berasal dari tradisi yang beragam, antara lain teori komunikasi, etika media, literasi digital, tata kelola platform, pendidikan masyarakat, dan etika kecerdasan buatan. Telaah integratif memungkinkan peneliti tidak hanya merangkum literatur, tetapi juga mengkritik, menghubungkan, dan menyusun kembali pengetahuan yang tersebar menjadi kerangka konseptual yang lebih utuh (Torraco, 2016). Desain ini dilaksanakan melalui penetapan fokus, penelusuran dan seleksi sumber, penilaian relevansi, ekstraksi gagasan, analisis isi, sintesis tematik, serta penyusunan kesimpulan. Hasilnya diarahkan pada generalisasi analitis dan konseptual, bukan generalisasi statistik terhadap populasi tertentu dalam kerangka kajian komunikasi kontemporer yang bertanggung jawab.

Sumber data penelitian seluruhnya berupa data sekunder yang berasal dari teks akademik dan dokumen kelembagaan. Sumber utama meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding yang relevan, serta dokumen organisasi internasional yang membahas etika komunikasi, literasi media, tata kelola platform digital,



dan etika kecerdasan buatan. Literatur ditelusuri melalui ScienceDirect, Directory of Open Access Journals, dan Google Scholar menggunakan kata kunci *communication ethics*, *ethical communication*, etika komunikasi, teori komunikasi, *digital literacy*, dan *digital communication*. Pemilihan sumber didasarkan pada keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, kejelasan identitas publikasi, kredibilitas penerbit, serta kontribusinya dalam menjelaskan konsep, unsur, prinsip, dan tujuan etika komunikasi. Sumber yang hanya menyebut etika secara umum tanpa hubungan yang jelas dengan komunikasi tidak dijadikan dasar utama sintesis. Data yang diekstraksi meliputi definisi, konsep pokok, argumen, konteks penggunaan, pendekatan teoretis, temuan, serta implikasi pendidikan. Penggunaan beragam jenis sumber membantu mempertemukan perspektif teoretis, empiris, kebijakan, dan pendidikan dalam satu pembahasan yang komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen secara bertahap, bukan melalui observasi lapangan, survei, wawancara, kelompok diskusi terarah, atau dialog dengan informan. Tahap pertama adalah merumuskan fokus penelusuran berdasarkan masalah penelitian, yaitu konsep, unsur, prinsip, tujuan, dan relevansi etika komunikasi bagi literasi digital serta pendidikan masyarakat. Tahap kedua adalah menjalankan pencarian pada basis data yang telah ditentukan dengan kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris, baik secara tunggal maupun melalui penggabungan istilah yang relevan. Tahap ketiga adalah menyaring judul, abstrak, kata kunci, dan isi penuh untuk memastikan kesesuaian sumber dengan fokus penelitian. Tahap keempat adalah memeriksa kelengkapan identitas bibliografis, reputasi sumber, keterhubungan argumentasi, serta kemungkinan duplikasi. Tahap kelima adalah mencatat informasi penting ke dalam matriks literatur yang memuat penulis, tahun, tujuan, konsep, metode, hasil, dan kontribusi setiap sumber. Prosedur tersebut mengikuti prinsip bahwa penelitian tinjauan perlu menjelaskan proses pencarian, seleksi, penilaian, analisis, sintesis, dan pelaporan secara transparan agar hasilnya dapat ditelusuri dan dinilai secara ilmiah (Kunisch et al., 2023).

Analisis data dilakukan melalui kombinasi analisis isi kualitatif dan sintesis tematik. Tahap pertama adalah familiarisasi dengan membaca sumber secara berulang untuk memahami konteks, istilah, dan posisi argumentatif setiap penulis. Tahap kedua adalah pemberian kode awal terhadap bagian yang membahas definisi etika komunikasi, unsur proses komunikasi, prinsip moral, tujuan, risiko digital, literasi masyarakat, dan tata kelola teknologi. Tahap ketiga adalah mengelompokkan kode menjadi kategori yang lebih luas, membandingkan kesamaan dan perbedaan antarsumber, serta mengidentifikasi perubahan konsep dari komunikasi konvensional menuju komunikasi berbasis platform dan kecerdasan buatan. Tahap keempat adalah membangun tema utama, yaitu etika sebagai sistem nilai, etika pada unsur komunikasi, prinsip komunikasi bertanggung jawab, serta relevansinya bagi pendidikan masyarakat. Tahap kelima adalah menginterpretasikan



hubungan antartema dan merumuskan sintesis konseptual. Kualitas analisis dijaga melalui pemeriksaan ulang kesesuaian tema dengan data, perbandingan lintas jenis sumber, pencatatan dasar interpretasi, dan penghindaran klaim yang tidak didukung literatur. Prosedur ini sejalan dengan tuntutan konsistensi, transparansi, dan reflektivitas dalam analisis tematik kualitatif (Braun & Clarke, 2021).

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Transformasi Konsep Etika Komunikasi sebagai Sistem Nilai

Hasil sintesis pertama memperlihatkan perubahan pemahaman etika komunikasi dari seperangkat aturan mengenai kesopanan dan benar-salahnya pesan menuju sistem nilai yang melekat pada keseluruhan proses komunikasi. Literatur yang dibaca menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya memindahkan informasi, tetapi juga membentuk makna, relasi sosial, kepercayaan, dan tindakan yang dapat memberikan manfaat maupun kerugian kepada orang lain. Littlejohn & Foss (2021) dan Griffin et al (2019) menempatkan etika sebagai bagian dari pembentukan makna dan hubungan antarmanusia, sedangkan McQuail & Deuze (2026) menekankan tanggung jawab sosial media terhadap kepentingan publik. Literatur digital kemudian memperluas persoalan tersebut dengan memasukkan peran platform, algoritma, pengumpulan data, dan kecerdasan buatan dalam menentukan visibilitas serta dampak pesan. Bukti ini menunjukkan dimensi *change/transformation* dalam CCTES yaitu objek etika bergeser dari perilaku individual komunikator menuju tanggung jawab relasional dan sistemik. Pada saat yang sama muncul *controversy*, yaitu pertentangan antara komunikasi yang dianggap berhasil karena memperoleh perhatian luas dan komunikasi yang dinilai baik karena benar, bertanggung jawab, dan menghormati penerimanya.

Pemetaan data memperlihatkan bahwa etika melekat pada komunikator, pesan, media, komunikasi, konteks, efek, dan umpan balik. Komunikator bertanggung jawab memastikan kejujuran, kompetensi, dan integritas sumber. Pesan harus akurat, jelas, relevan, serta tidak manipulatif dan media perlu dipilih dengan mempertimbangkan karakter, jangkauan, algoritma, dan potensi dampaknya. Komunikasi tidak lagi dipahami sebagai penerima pasif, melainkan sebagai pihak yang menafsirkan, memeriksa, memproduksi ulang, dan menyebarkan informasi. Konteks menentukan kepantasan, sensitivitas, serta kemungkinan perbedaan penafsiran, sedangkan efek menuntut pertimbangan terhadap konsekuensi psikologis, sosial, politik, dan budaya. Umpan balik juga memiliki dimensi etis karena tanggapan dapat diberikan secara argumentatif dan menghormati manusia atau berubah menjadi penghinaan serta serangan personal. Dengan menyatakan ulang data tersebut, etika komunikasi dapat dipahami sebagai mekanisme



yang menghubungkan nilai moral dengan setiap keputusan sepanjang perjalanan pesan. Komunikasi etis karena itu tidak hanya bergantung pada isi yang benar, tetapi juga pada sumber, cara produksi, pemilihan media, perlakuan terhadap khalayak, dan tanggung jawab atas akibatnya.

Tabel 1. Transformasi konsep etika komunikasi

Unsur	Tuntutan etis	Risiko digital	Dimensi CCTES
Komunikator	Integritas dan kejujuran	Identitas palsu dan otoritas semu	Kontroversi
Pesan	Akurasi dan relevansi	Disinformasi dan manipulasi	Darurat
Media	Transparansi dan tanggung jawab	Amplifikasi algoritmik	Transformasi
Komunikan	Verifikasi dan penilaian kritis	Penyebaran ulang tanpa pemeriksaan	Tren
Umpan balik	Kesantunan dan argumentasi	Ujaran kebencian dan perundungan	Solusi

Dari bukti pertama ditemukan empat pola. Pertama, etika komunikasi bersifat menyeluruh karena nilai moral tidak hanya diterapkan pada isi pesan, tetapi juga pada sumber, media, khalayak, konteks, efek, dan umpan balik. Kedua, terdapat transformasi dari tanggung jawab individual menuju tanggung jawab bersama yang melibatkan pengguna, organisasi, media, penyedia platform, pengembang teknologi, dan institusi publik. Ketiga, efektivitas komunikasi tidak identik dengan kualitas etis; pesan yang viral, persuasif, dan menjangkau banyak orang belum tentu benar atau berorientasi pada kepentingan publik. Keempat, perkembangan teknologi tidak menghapus prinsip moral yang lama, tetapi memperluas wilayah penerapannya. Kejujuran tetap menjadi dasar, tetapi pada lingkungan digital harus disertai keterbukaan mengenai sumber, penggunaan data, proses otomatisasi, dan keterlibatan kecerdasan buatan. Keempat pola tersebut memperlihatkan bahwa perubahan utama bukan terletak pada hilangnya etika tradisional, melainkan pada kebutuhan menerjemahkannya ke dalam struktur komunikasi yang lebih kompleks. Dengan demikian, etika komunikasi kontemporer berkembang menjadi kerangka untuk menilai manusia, pesan, relasi, dan sistem teknologi secara bersamaan.



Konvergensi Prinsip Etika dan Perluasan Akuntabilitas Digital

Hasil sintesis kedua menunjukkan adanya konvergensi literatur pada enam prinsip utama, yaitu kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan akuntabilitas. Kejujuran mengharuskan pesan sesuai dengan fakta dan tidak disusun untuk menipu, sementara tanggung jawab mengharuskan komunikator memperhitungkan konsekuensi pesan terhadap individu maupun masyarakat. Keadilan berkaitan dengan kesempatan memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi. Keterbukaan menuntut transparansi mengenai sumber, kepentingan, metode produksi, dan keterbatasan informasi. Penghormatan terhadap martabat manusia mencakup kesantunan, perlindungan privasi, keamanan data, dan penolakan terhadap eksploitasi identitas. Akuntabilitas mengharuskan individu maupun institusi dapat menjelaskan serta mempertanggungjawabkan proses dan akibat komunikasinya. Konvergensi tersebut menjadi bukti *trend* dalam CCTES karena berbagai bidang komunikasi bergerak menuju standar etis yang serupa. Namun, transformasi digital memperluas prinsip akuntabilitas: tanggung jawab tidak berhenti pada pembuat pesan, tetapi juga mencakup platform, algoritma, dan lembaga yang mengatur distribusi informasi. Pendekatan UNESCO terhadap etika kecerdasan buatan juga menempatkan hak asasi, martabat manusia, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama.

bentuk penyajian memperlihatkan bahwa setiap nilai etis memiliki bentuk pelanggaran dan indikator penerapan yang berbeda. Kejujuran dilanggar melalui fabrikasi informasi, penghilangan konteks, dan penyamaran sumber pada penerapannya tampak pada verifikasi fakta serta koreksi terbuka. Tanggung jawab dilanggar ketika pengguna menganggap unggahan sebagai tindakan tanpa konsekuensi; penerapannya ditunjukkan melalui pertimbangan terhadap dampak dan kesiapan memperbaiki kerugian. Keadilan terganggu oleh diskriminasi, pembungkaman, atau distribusi informasi yang tidak setara, sedangkan keterbukaan melemah ketika kepentingan komersial, politik, atau penggunaan teknologi otomatis disembunyikan. Penghormatan terhadap martabat manusia dilanggar melalui perundungan, ujaran kebencian, penyebaran data pribadi, dan eksploitasi citra tanpa persetujuan. Akuntabilitas menjadi lemah apabila tidak tersedia pihak yang dapat dimintai penjelasan atas keputusan moderasi, rekomendasi algoritmik, atau produksi konten berbasis kecerdasan buatan. Pernyataan ulang data ini menunjukkan bahwa prinsip etika tidak bersifat abstrak. Masing-masing dapat diterjemahkan menjadi tindakan komunikasi, indikator perilaku, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diajarkan serta dievaluasi dalam pendidikan masyarakat.



Tabel 2. Prinsip etika komunikasi kontemporer

Prinsip	Bentuk penerapan	Bentuk pelanggaran	Kompetensi yang diperlukan
Kejujuran	Verifikasi dan koreksi	Fabrikasi dan manipulasi	Pemeriksaan fakta
Tanggung jawab	Mempertimbangkan dampak	Berbagi tanpa kehati-hatian	Refleksi konsekuensi
Keadilan	Perlakuan setara	Diskriminasi dan pembungkaman	Kesadaran keberagaman
Keterbukaan	Transparansi sumber	Kepentingan tersembunyi	Evaluasi kredibilitas
Martabat manusia	Privasi dan kesantunan	Perundungan dan eksploitasi	Empati digital
Akuntabilitas	Penjelasan dan pemulihan	Penghindaran tanggung jawab	Tata kelola etis

Dari bukti kedua diperoleh empat kecenderungan. Pertama, prinsip etika saling bergantung dan tidak efektif apabila diterapkan secara terpisah. Kejujuran tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi penyampaian fakta yang merendahkan, sedangkan keterbukaan tanpa perlindungan martabat dapat mengarah pada pembocoran informasi pribadi. Kedua, orientasi etika bergeser dari kepatuhan normatif menuju pembangunan kepercayaan, perlindungan hak, dan pencegahan kerugian. Ketiga, akuntabilitas berkembang menjadi prinsip penghubung antara perilaku individual dan tata kelola teknologi karena pengguna, institusi, dan platform memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda tetapi saling berkaitan. Keempat, penerapan prinsip membutuhkan mekanisme koreksi dan pemulihan, bukan hanya larangan dan sanksi. Kesalahan informasi perlu dikoreksi, korban pelanggaran privasi harus dilindungi, dan pihak yang dirugikan perlu memperoleh mekanisme pengaduan. Pola tersebut menunjukkan bahwa *solution* dalam CCTES tidak cukup berupa imbauan agar masyarakat “berkomunikasi dengan baik”. Solusi perlu diwujudkan dalam pendidikan, kode etik, transparansi teknologi, moderasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta prosedur penanganan pelanggaran yang adil dan berorientasi pada pemulihan.



Etika Komunikasi sebagai Fondasi Literasi Digital dan Pendidikan Masyarakat

Hasil sintesis ketiga menunjukkan bahwa tujuan etika komunikasi berkembang dari upaya menciptakan penyampaian pesan yang efektif menuju pembangunan kepercayaan, tanggung jawab sosial, ruang dialog yang sehat, perlindungan kepentingan publik, dan literasi digital masyarakat. Literatur yang dianalisis menempatkan kepercayaan sebagai hasil dari konsistensi antara kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab komunikator. Etika juga berfungsi menjaga agar kebebasan berekspresi tidak digunakan untuk menyebarkan manipulasi, diskriminasi, kekerasan simbolik, atau pelanggaran hak orang lain. Dalam lingkungan digital, tujuan tersebut menjadi semakin mendesak karena media sosial memungkinkan pengguna menerima, memproduksi, mengubah, dan mendistribusikan pesan dalam waktu singkat. Konten berbasis kecerdasan buatan memperluas tantangan melalui produksi teks, gambar, audio, dan video sintetis yang dapat memperoleh legitimasi semu. Bukti ini menunjukkan dimensi *emergency* dalam CCTES berupa meningkatnya kerentanan terhadap disinformasi, eksploitasi data, kebingungan mengenai sumber, dan penurunan kepercayaan. Namun, literatur juga menawarkan *solution* berupa literasi media, verifikasi informasi, kesadaran algoritmik, perlindungan hak digital, serta pendidikan penggunaan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab.

Data dapat dinyatakan ulang melalui hubungan antara tujuan etika, risiko digital, dan kompetensi pendidikan masyarakat. Tujuan membangun kepercayaan memerlukan kemampuan memeriksa sumber, membedakan fakta dari opini, dan mengenali konflik kepentingan. Tujuan melindungi martabat manusia membutuhkan kesadaran mengenai privasi, persetujuan, keamanan data, dan dampak komunikasi terhadap kelompok rentan. Tujuan menciptakan dialog demokratis memerlukan kemampuan menyampaikan perbedaan secara argumentatif tanpa intimidasi dan serangan personal. Tujuan mempertahankan akuntabilitas menuntut pemahaman mengenai pihak yang menghasilkan pesan, cara konten diproses, serta mekanisme pengaduan dan koreksi. Pendidikan masyarakat karena itu tidak cukup mengajarkan penggunaan perangkat atau aplikasi. Literasi digital harus mencakup kemampuan teknis, kognitif, sosial, dan etis. Manca et al. (2021) membedakan keterampilan media sosial yang berlaku lintas-platform dengan keterampilan yang bergantung pada karakter platform tertentu. Sementara itu, Hakimi et al. (2021), melalui analisis terhadap 77 penelitian, menunjukkan bahwa penggunaan data digital dalam pendidikan berkaitan dengan persoalan privasi, persetujuan, kepemilikan, transparansi, serta akuntabilitas.



Tabel 3. Tujuan etika dan pendidikan masyarakat

Tujuan etika	Risiko yang dihadapi	Kompetensi pendidikan
Membangun kepercayaan	Sumber palsu dan manipulasi	Verifikasi kredibilitas
Melindungi martabat	Perundungan dan eksploitasi data	Privasi dan empati digital
Menjaga kepentingan publik	Disinformasi dan polarisasi	Evaluasi dampak pesan
Membentuk dialog sehat	Ujaran kebencian	Argumentasi dan kesantunan
Memperkuat akuntabilitas	Keputusan algoritmik tertutup	Kesadaran platform dan AI
Mencegah penyalahgunaan	Penyebaran tanpa pemeriksaan	Pengendalian perilaku berbagi

Dari bukti ketiga ditemukan empat pola. Pertama, literasi digital merupakan penerapan praktis etika komunikasi, bukan kompetensi yang terpisah. Kemampuan mencari dan menggunakan informasi baru menjadi bermakna apabila disertai verifikasi, pertimbangan dampak, penghormatan terhadap hak digital, dan tanggung jawab berbagi. Kedua, masyarakat digital harus dipahami sebagai penerima sekaligus produsen pesan sehingga pendidikan tidak cukup berfokus pada perlindungan pengguna, tetapi juga pada tanggung jawab mereka terhadap pengguna lain. Ketiga, literasi perlu bersifat kontekstual karena risiko dan praktik komunikasi berbeda menurut platform, kelompok pengguna, tujuan, dan budaya. Keempat, pendidikan etika harus bergerak dari hafalan prinsip menuju latihan pengambilan keputusan berbasis kasus. Peserta perlu menghadapi contoh sumber meragukan, konten manipulatif, pelanggaran privasi, konflik daring, dan keluaran kecerdasan buatan untuk menentukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini memperlihatkan bahwa solusi pendidikan yang hanya berbentuk seminar sesekali tidak cukup. Penguatan etika komunikasi memerlukan integrasi ke dalam pembelajaran, kegiatan masyarakat, tata kelola organisasi, kampanye publik, dan prosedur koreksi yang dilakukan secara berkelanjutan.



Discussion

Hasil penelitian memperlihatkan tiga temuan utama mengenai etika komunikasi pada era digital. Pertama, etika komunikasi telah mengalami transformasi dari seperangkat aturan normatif menjadi sistem nilai yang menghubungkan komunikator, pesan, media, komunikan, konteks, efek, dan umpan balik. Kedua, literatur menunjukkan konvergensi pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi organisasi, institusi media, penyedia platform, dan pengembang kecerdasan buatan. Ketiga, etika komunikasi memiliki relevansi langsung bagi literasi digital dan pendidikan masyarakat karena kualitas partisipasi digital ditentukan oleh kemampuan menilai kredibilitas, melindungi privasi, memahami dampak pesan, menghormati perbedaan, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas komunikasi tidak dapat dinilai hanya dari keberhasilan pesan mencapai khalayak. Komunikasi yang berkualitas juga harus benar, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan kesejahteraan pihak yang terlibat. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai penghubung antara teori komunikasi, perilaku pengguna, pendidikan literasi, dan tata kelola teknologi digital.

Hubungan antara etika komunikasi dan literasi digital dapat dijelaskan melalui mekanisme pembentukan keputusan. Prinsip kejujuran mendorong pengguna memeriksa kebenaran sebelum mempercayai atau menyebarkan pesan, tanggung jawab membuat pengguna mempertimbangkan dampak sosial, keterbukaan membantu khalayak mengenali sumber, kepentingan, dan keterbatasan informasi. Keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia mengarahkan pengguna agar tidak mendiskriminasi, mengeksploitasi identitas, atau menyebarkan data pribadi. Akuntabilitas memastikan bahwa kesalahan tidak berhenti pada pengakuan, tetapi diikuti koreksi, penjelasan, dan pemulihan. Oleh karena itu, internalisasi prinsip etika memperkuat keterampilan literasi karena pengguna tidak hanya mengetahui cara mengoperasikan teknologi, tetapi juga memiliki dasar untuk menentukan kapan harus percaya, membagikan, menolak, atau memperbaiki informasi. Sebaliknya, keterampilan digital tanpa orientasi etis dapat meningkatkan kemampuan memproduksi dan menyebarkan pesan tanpa meningkatkan tanggung jawab. Inilah sebabnya pendidikan literasi yang hanya menekankan aspek teknis belum cukup menghadapi disinformasi, bias algoritmik, pelanggaran privasi, serta konten sintetis yang dihasilkan kecerdasan buatan.

Temuan penelitian memiliki persamaan dengan studi terdahulu yang menempatkan etika sebagai bagian dari kualitas komunikasi, kepercayaan, tanggung jawab sosial, dan hubungan antarmanusia (Littlejohn & Foss, 2021). Hasilnya juga sejalan dengan UNESCO (2023) yang menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia, transparansi,



akuntabilitas, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam tata kelola kecerdasan buatan serta platform digital. Kajian ini berbeda dari penelitian yang hanya memusatkan perhatian pada satu bidang, seperti etika jurnalistik, komunikasi interpersonal, tata kelola data, atau literasi media sosial. Kebaruannya terletak pada pengintegrasian empat lapisan dalam satu kerangka yaitu nilai moral, unsur proses komunikasi, struktur teknologi, dan pendidikan masyarakat. Broda & Strömbäck (2024) menunjukkan bahwa kajian misinformasi serta disinformasi berkembang pesat, tetapi masih menghadapi fragmentasi istilah, pendekatan, dan disiplin. Penelitian ini merespons fragmentasi tersebut dengan menempatkan etika komunikasi sebagai penghubung antara kemampuan verifikasi, tanggung jawab produksi pesan, perlindungan hak digital, dan akuntabilitas teknologi. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menghadapi informasi salah, tetapi juga sebagai kapasitas berpartisipasi secara moral dalam ekosistem komunikasi.

Secara interpretatif, transformasi etika komunikasi mencerminkan perubahan historis dari masyarakat yang didominasi komunikasi tatap muka dan media massa menuju masyarakat platform. Pada sistem media sebelumnya, produksi serta distribusi pesan lebih banyak dikendalikan oleh institusi profesional, sedangkan masyarakat terutama menjadi khalayak. Media digital mengubah hubungan tersebut karena setiap pengguna dapat bertindak sebagai komunikator, editor, distributor, komentator, dan penghubung jaringan. Secara sosial, perubahan ini memperluas partisipasi, tetapi sekaligus mendistribusikan risiko serta tanggung jawab kepada masyarakat. Secara ideologis, platform sering mengukur keberhasilan melalui perhatian, keterlibatan, dan pertumbuhan pengguna, sedangkan etika komunikasi menilai keberhasilan berdasarkan kebenaran, keadilan, martabat manusia, dan kepentingan publik. Ketegangan antara logika keterlibatan dan logika etis menjelaskan mengapa konten emosional atau manipulatif dapat memperoleh visibilitas tinggi meskipun merusak kualitas ruang publik. Makna utama temuan penelitian adalah bahwa etika tidak boleh diletakkan sebagai tambahan setelah teknologi digunakan. Etika perlu menjadi dasar sejak proses merancang pesan, memilih media, mengelola data, mengembangkan algoritma, menanggapi khalayak, hingga mengevaluasi dampak komunikasi.

Refleksi terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa etika komunikasi memiliki fungsi sekaligus kemungkinan disfungsi. Fungsinya adalah membangun kepercayaan, mengurangi manipulasi, melindungi martabat manusia, memperkuat dialog, dan menyediakan dasar pertanggungjawaban. Dalam pendidikan masyarakat, prinsip etika membantu pengguna menahan diri sebelum membagikan informasi, memeriksa kredibilitas, menghormati privasi, serta mengoreksi kesalahan tanpa mempermalukan orang lain. Namun, etika dapat mengalami disfungsi apabila hanya dijadikan daftar



larangan, alat pembenaran sensor, atau tuntutan kesopanan yang menutup kritik. Penekanan berlebihan pada harmoni dapat membungkam kelompok yang menyampaikan pengalaman ketidakadilan, sedangkan tuntutan transparansi yang tidak disertai perlindungan privasi dapat menimbulkan kerugian baru. Kode etik yang terlalu umum juga dapat menjadi simbol administratif tanpa mengubah perilaku. Oleh karena itu, penerapan etika perlu menyeimbangkan kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap kerugian, keterbukaan, keamanan data, dan hak untuk berbeda pendapat. Refleksi ini menegaskan bahwa komunikasi etis bukan komunikasi tanpa konflik, melainkan komunikasi yang mengelola perbedaan melalui bukti, argumentasi, kesetaraan, penghormatan, serta mekanisme koreksi dan pemulihan yang adil.

Implikasi penelitian adalah perlunya rencana aksi yang menghubungkan pendidikan, tata kelola, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Pertama, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat perlu memasukkan etika komunikasi ke dalam program literasi digital melalui pembelajaran berbasis kasus mengenai disinformasi, privasi, perundungan, konflik daring, dan penggunaan kecerdasan buatan. Kedua, peserta perlu dilatih melakukan pemeriksaan sumber, pembacaan lateral, penelusuran konteks, evaluasi visual, dan penundaan berbagi ketika bukti belum mencukupi. Ketiga, organisasi perlu memiliki kode etik, kanal pengaduan, mekanisme koreksi, dan prosedur pemulihan yang mudah diakses. Keempat, penggunaan kecerdasan buatan harus disertai transparansi, verifikasi keluaran, perlindungan data, dan penegasan bahwa manusia tetap bertanggung jawab atas hasil akhir. Kelima, evaluasi program tidak cukup mengukur kehadiran peserta, tetapi perlu menilai perubahan kemampuan, perilaku berbagi, kesadaran privasi, dan kualitas dialog. UNESCO (2023) menekankan bahwa tata kelola digital memerlukan pembagian tanggung jawab antara negara, platform, masyarakat sipil, media, akademisi, dan komunitas teknis. Karena itu, penguatan etika komunikasi harus dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa etika komunikasi tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan kesantunan atau larangan menyampaikan informasi yang salah, tetapi sebagai sistem nilai yang bekerja pada seluruh proses komunikasi, mulai dari integritas komunikator, akurasi pesan, pemilihan media, posisi komunikan, konteks, dampak, hingga umpan balik. Hikmah utama yang dapat diambil ialah bahwa kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya menghasilkan komunikasi yang lebih baik. Semakin cepat informasi diproduksi dan disebarkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, penghormatan terhadap martabat



manusia, dan akuntabilitas. Dalam konteks pendidikan masyarakat, literasi digital karenanya tidak cukup dibangun melalui keterampilan menggunakan perangkat atau mengenali fitur platform, tetapi harus disertai kemampuan menilai kredibilitas, mempertimbangkan dampak sosial, melindungi privasi, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab atas pesan yang dibagikan. Dengan demikian, kualitas komunikasi digital sangat ditentukan oleh keterpaduan antara kompetensi teknis dan kesadaran etis dalam setiap tindakan komunikasi. Pelajaran ini menegaskan bahwa pendidikan etika harus menjadi bagian inti, bukan tambahan, dalam membangun masyarakat digital yang kritis dan bertanggung jawab.

Kekuatan penelitian ini terletak pada upayanya menyatukan konsep, unsur, prinsip, dan tujuan etika komunikasi yang sebelumnya sering dibahas secara terpisah. Secara keilmuan, penelitian ini memberikan sumbangan konseptual berupa kerangka integratif yang menghubungkan etika komunikasi, literasi digital, pendidikan masyarakat, tata kelola platform, dan penggunaan kecerdasan buatan. Data yang digunakan memang berbentuk literatur, tetapi sintesisnya menghasilkan pemetaan tentang bagaimana kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan akuntabilitas diterapkan pada komunikator, pesan, media, komunikan, konteks, dampak, dan umpan balik. Pendekatan ini memperluas etika komunikasi dari persoalan perilaku individual menuju tanggung jawab bersama antara pengguna, organisasi, institusi media, penyedia platform, dan pengembang teknologi. Penelitian ini juga menawarkan proposisi analitis bahwa penguatan etika komunikasi dapat memperkuat kualitas literasi digital dan pendidikan masyarakat. Dari sini muncul pertanyaan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi kurikulum, indikator perilaku, mekanisme evaluasi, dan kebijakan komunikasi digital yang kontekstual. Kontribusi tersebut membuat kajian ini berguna sebagai dasar konseptual bagi penelitian empiris dan perancangan program pendidikan masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena seluruh temuan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan tidak diuji menggunakan data empiris dari observasi, wawancara, survei, eksperimen, atau kelompok diskusi terarah. Akibatnya, penelitian belum dapat menjelaskan secara langsung bagaimana masyarakat memahami, menerima, atau menerapkan prinsip etika komunikasi dalam kehidupan digital sehari-hari. Literatur yang digunakan juga berasal dari beragam disiplin dan konteks, sehingga perbedaan budaya, usia, tingkat pendidikan, jenis platform, serta pengalaman pengguna belum dianalisis secara mendalam. Selain itu, penelitian belum menggunakan prosedur tinjauan sistematis atau analisis bibliometrik yang memungkinkan pengukuran perkembangan tema, jaringan penulis, dan kecenderungan publikasi secara lebih terstruktur. Penelitian lanjutan perlu menguji kerangka konseptual ini melalui pendekatan kualitatif, kuantitatif,



atau metode campuran pada kelompok masyarakat tertentu. Kajian berikutnya juga dapat mengembangkan instrumen etika komunikasi digital, mengevaluasi program pendidikan masyarakat, membandingkan perilaku antargenerasi dan antarplatform, serta menilai efektivitas kebijakan transparansi, perlindungan privasi, koreksi informasi, dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, temuan konseptual penelitian ini dapat dikembangkan menjadi model yang lebih terukur, aplikatif, dan sesuai dengan keragaman konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Batoebara, M. U., & Lubis, M. syaroh I. (2022). Communication Ethics in the World of Digital Media. *Proceedings Of International Conference On Communication Science*, 2(1), 104–107. <https://doi.org/10.29303/iccsproceeding.v2i1.62>
2. Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
3. Broda, E., & Strömbäck, J. (2024). Misinformation, disinformation, and fake news: lessons from an interdisciplinary, systematic literature review. *Annals of the International Communication Association*, 48(2), 139–166. <https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2323736>
4. Floridi, L. (2023). The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities. In *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. Springer. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198883098.001.0001>
5. Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2019). A First Look at Communication Theory -10/E. In <https://Openlibrary.Telkomuniversity.Ac.Id/Pustaka/145886/a-First-Look-At-Communication-Theory-10-E-.Html> (11th ed.). McGraw-Hill
6. Hakimi, L., Eynon, R., & Murphy, V. A. (2021). The Ethics of Using Digital Trace Data in Education: A Thematic Review of the Research Landscape. *Review of Educational Research*, 91(5), 671–717. <https://doi.org/10.3102/00346543211020116>
7. Kunisch, S., Denyer, D., Bartunek, J. M., Menz, M., & Cardinal, L. B. (2023). Review Research as Scientific Inquiry. *Organizational Research Methods*, 26(1), 3–45. <https://doi.org/10.1177/10944281221127292>
8. Laksana, M. O., & Nurhaliza, N. (2023). The Impact of Communication Ethics on The Communication Quality in Interpersonal Relationships. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(5), 989–995. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i5.815>
9. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2021). *Theories of Human Communication* (12th ed.). Waveland Press. <http://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3Fk0aRpJM4C&pgis=1>



10. Manca, S., Bocconi, S., & Gleason, B. (2021). "Think globally, act locally": A glocal approach to the development of social media literacy. *Computers and Education*, 160, 104025. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104025>
11. McQuail, D., & Deuze, M. (2026). McQuail's Media and Mass Communication Theory. In *McQuail's Media and Mass Communication Theory* (7th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781036235246>
12. Rousi, R., & Vakkuri, V. (2023). Introduction to ethics in the age of digital communication. In *Digitalisoituvä viestintä muuttuvassa maailmassa. Computers and Society. ArXiv*, 50–58. <https://doi.org/10.1007/s43681-023-00333-4>
13. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
14. Torraco, R. J. (2016). Writing Integrative Literature Reviews: Using the Past and Present to Explore the Future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
15. UNESCO. (2021). Recommendation on The Ethics of Artificial Intelligence. In *Bots and Beasts* (Issue November). UNESCO.
16. UNESCO. (2023). Guidelines for the governance of digital platforms: safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach (nep). In *Guidelines for the governance of digital platforms: safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach (nep)*. UNESCO. <https://doi.org/10.58338/nout7356>
17. Utari, P., Pramana, P., & Ramadhani, A. (2024). Beyond Human Communication: the Artificial Intelligence Phenomenon in the Perspective of Communication Theory. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 135–151. <https://doi.org/10.14710/interaksi.13.1.135-151>
18. Waisbord, S. (2018). Truth is What Happens to News: On journalism, fake news, and post-truth. *Journalism Studies*, 19(13), 1866–1878. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881>
19. Wardle, C. & Hossein, D. (2017). Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. In *Report to the Council of Europe* (Issue September 2017). Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c>
20. Wilkins, L. (1991). Ethics in Human Communication (Book). In *Journal of Mass Media Ethics* (6th ed., Vol. 6, Issue 1). Waveland Press. https://doi.org/10.1207/s15327728jmme0601_7

